

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia memasuki era baru, yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Otonomi daerah ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan.

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan berkembang (Wayan et al., 2015). Dimana pembangunan nasional berjalan selaras dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menjadi sesuatu yang sangat

penting karena ketika berbicara mengenai pembangunan ekonomi berarti di dalamnya terdapat sebuah proses pembangunan yang melibatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan beberapa perubahan. Adanya pembangunan ekonomi bisa jadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, begitu pula sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah (Kusumawati & Wiksuana, 2018).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut (Yuliana, 2014) Pertumbuhan ekonomi merupakan output yang dihasilkan dari berbagai sektor yang memberikan gambaran bagaimana kemajuan atau kemunduran yang telah dicapai dalam sektor ekonomi pada suatu periode tertentu. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka kesejahteraan masyarakat akan terlihat jelas, karena tingginya pertumbuhan ekonomi suatu negara diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari

pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Tujuan utama pembangunan daerah adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan ketimpangan pendapatan rendah dapat dicapai namun keduanya tidak dapat dicapai secara bersamaan (Shin, 2012). Oleh karena itu demi mencapai tujuan dari pembangunan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan ekonomi yang baik karena pada dasarnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki, dimana pada umumnya berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono, 1985 dalam Adyatma & Oktaviani, 2015). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut PDRB (Jaya & Dwirandra, 2014). Produk Domestik Regional Bruto untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menggunakan Produk Domestik Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi. Hal ini senada dengan teori menurut (Kusumawati & Wiksuana, 2018) menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Pengelolaan pemerintahan yang harus dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah menuntut adanya kemandirian daerah dalam menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya. Kemandirian daerah ini dicerminkan dengan kemampuan daerah menghasilkan penerimaan pendapatan yang diperoleh daerah tersebut yang berasal dari potensi-potensi ekonomi daerah. Potensi-potensi ekonomi daerah ini juga disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dialokasikan untuk kegiatan pelayanan kepada publik yang merupakan salah satu harapan masyarakat kepada pemerintah di dalam era desentralisasi fiskal ini. Peningkatan pelayanan publik yang dimaksud salah satunya adalah dengan pemberian proporsi belanja modal yang lebih besar.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2015-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Miliar)
	Pendapatan Pajak Daerah (Rp. Miliar)	Pendapatan Retribusi Daerah (Rp. Miliar)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (Rp. Miliar)	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Rp. Miliar)	
2015	12,632,465,919.00	8,827,745,102.00	22,885,186,838.00	22,925,394,587.37	67,270,792,446.37
2016	14,547,761,178.00	9,401,430,379.00	21,346,010,143.00	27,919,529,852.25	73,214,731,552.25
2017	18,846,718,341.00	5,797,929,674.00	15,728,041,344.00	78,725,371,276.33	119,098,060,635.33
2018	15,639,947,591.00	6,806,148,825.00	15,579,962,678.00	28,156,936,300.25	66,182,995,394.25
2019	8,142,214,465.00	5,038,093,436.00	15,542,552,638.00	14,265,025,770.00	42,987,886,309.00
2020	18,833,784,489.00	5,649,188,367.00	14,803,592,278.00	26,671,190,879.00	65,957,756,013.00
2021	16,402,201,322.00	22,550,240,220.00	14,050,140,213.00	21,340,120,138.00	74,342,701,893.00

Sumber: Kabupaten Kupang, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pendapatan asli daerah di Kabupaten Kupang tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi anggaran. Hal ini dilihat pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan PAD, akan tetapi pada tahun 2018-2021 kembali mengalami penurunan.

Belanja modal (BM) merupakan belanja yang dipergunakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau disebut jangka panjang untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yaitu : peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya dengan cara membeli yang umumnya dilakukan dengan proses lelang atau tender yang cukup rumit (Abdullah dan Halim, 2006).

Tabel 1.2
Belanja Modal Kabupaten Kupang Tahun 2015-2021

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp Miliar)
2014	123.375,00
2015	152.441,00
2016	409.656,00
2017	213.682,00
2018	274.361,00
2019	108.584,00
2020	120.630,00
2021	153.337,00

Sumber: Kabupaten Kupang, 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa belanja modal di Kabupaten Kupang tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi anggaran. Hal ini dilihat pada tahun 2016 mengalami kenaikan belanja modal dari tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2018-2021 kembali mengalami penurunan realisasi belanja modal.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga digunakan diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur di dalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakatpun turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor tersebut, produkifitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi,2007).

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan output per kapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan masyarakat tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif dalam mengkonsumsi barang dan jasa diikuti oleh daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik tingkat kabupaten/ kota maupun di tingkat provinsi. Badan Pusat Statistik (2016) menyebutkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan

secara mikro dilihat dari produk domestik regional bruto perkapitanya (Djoyohadikusumo, 1994:1). Semakin tinggi persentase pertumbuhan ekonomi suatu daerah bisa disimpulkan semakin makmur dan semakin baik daerah tersebut. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah harus baik pula. Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Tabel 1.3
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kupang
Tahun 2015-2021

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Rupiah)	Atas Dasar Harga Konstan (Rupiah)
2015	5.458.399,30	3.968.939,07
2016	6.020.701,71	4.159.665,85
2017	6.530.311,30	4.371.880,61
2018	7.138.757,68	4.595.816,08
2019	7.710.443,70	4.831.613,88
2020	7,7649,032.79	4.762.642,26
2021	7.984.705,90	4.885.118,32

Sumber: BPS Kabupaten Kupang, 2021

Data pada tabel 3 menunjukkan bahwa selama periode 2015-2021 Pendapatan Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK per tahun mengalami laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan pertumbuhan terendah pada tahun 2016.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Penelitian Bati (2009) membuktikan bahwa secara simultan dan parsial belanja modal dan pendapatan asli

daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi. Ginting (2013), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Secara parsial DAU dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara sedangkan LLPDYS tidak signifikan. Secara simultan DAU, DAK dan LLPDYS signifikan mempengaruhi desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Maryati dan Endrawati (2010), hasil dari penelitian ini adalah PAD, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Muis (2012), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Dana alokasi khusus berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.

Dari kedua pendapat diatas masih terdapat pengaruh antara belanja modal dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga perlu diteliti agar setiap daerah lebih memperhatikan mengenai hal tersebut agar pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul, **“Analisis Elastisitas Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kupang)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah “Analisis Elastisitas Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kupang)”

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Seberapa besar elastisitas belanja modal pemerintah Kabupaten Kupang selama tahun 2015-2021?
2. Bagaimana trend pertumbuhan ekonomi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Kupang selama tahun 2015-2021?
3. Bagaimana pengaruh elastisitas belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
4. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Kupang?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian, dari hasil penelitian dimaksud antara lain dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Penelitian:

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisa elastisitas belanja modal Pemerintah Kabupaten Kupang selama tahun 2015-2021.
- b. Untuk menganalisa trend pertumbuhan ekonomi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kupang selama tahun 2015-2021.
- c. Untuk menganalisa pengaruh elastisitas belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Kupang.
- d. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

1.4.2. Manfaat Penelitian:

Hasil dari penelitian yang dilakukan, manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan daerah

tentang Analisis Elastisitas Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kupang berkaitan dengan Analisis Elastisita Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.